

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI JAKARTA

Oleh

Wahyu Khairatunnisa

NIM. 2205040127

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penjarahan, khususnya yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa di Indonesia, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya. Meskipun secara normatif telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban, dalam praktiknya perlindungan dan pemulihan hak korban belum berjalan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penjarahan serta mengidentifikasi hambatan dalam pemulihan hak-hak korban menggunakan teori Arif Gosita dan Mendelshon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana penjarahan mengalami kerugian yang bersifat multidimensional, baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi kerusakan tempat tinggal, hilangnya barang berharga, dan rusaknya aset ekonomi, sedangkan kerugian immateriil berupa trauma psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, dan terganggunya kehidupan sosial korban. Perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung berorientasi pada aspek represif melalui pemidanaan pelaku, sementara pemulihan hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama meliputi sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, prosedur restitusi yang rumit, serta keterbatasan peran negara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penjarahan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan hak, martabat, dan rasa aman korban secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban penjarahan, Pemulihan hak korban.

LEGAL PROTECTION FOR THE RESTORATION OF THE RIGHTS OF VICTIMS OF LOOTING IN JAKARTA

By

Wahyu Khairatunnisa

NIM. 2205040127

Abstract

Legal protection for victims of looting, particularly those occurring during mass riots in Indonesia, still faces various problems in its implementation. Although normatively there are laws and regulations governing victims' rights, in practice, the protection and restoration of victims' rights have not been implemented optimally. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection provided to victims of looting and to identify obstacles in restoring victims' rights using the theory of Arif Gosita and Mendelshon. The research method used is a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that victims of looting experience multidimensional losses, both material and immaterial. Material losses include damage to homes, loss of valuables, and damage to economic assets, while immaterial losses include psychological trauma, fear, loss of security, and disruption to victims' social lives. The legal protection provided still tends to be oriented towards repressive aspects through criminal punishment of perpetrators, while restoration of victims' rights through restitution, compensation, and rehabilitation has not been optimally implemented. The main obstacles include the difficulty of identifying perpetrators, the perpetrators' limited economic capacity, complicated restitution procedures, and the limited role of the state and the Witness and Victim Protection Agency. This study concludes that legal protection for victims of looting must be implemented comprehensively, integrating preventive, repressive, and restorative approaches. The success of legal protection is measured not only by the punishment of perpetrators, but also by the state's ability to restore victims' rights, dignity, and sense of security in a just and sustainable manner.

Keyword: Legal protection, Victims of looting, Restoration of victims' rights.